

ABSTRAK

EVALUASI KEBIJAKSANAAN PERKREDITAN BANK
BERDASARKAN
SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA
NO. 27/162/KEP/DIR TANGGAL 31 MARET 1995
(Studi Kasus pada Bank BPD DIY)

Dwiani Noortriasti
NIM: 052114162
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2010

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk menjamin pelaksanaan perkreditan yang sehat dan menguntungkan, maka setiap bank wajib memiliki Kebijakan Perkreditan Bank secara tertulis yang sekurang-kurangnya harus mengandung semua aspek yang tertuang dalam Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/KEP/DIR Tanggal 31 Maret 1995.

Bank BPD DIY merupakan bank milik Pemerintah Daerah Provinsi DIY yang memiliki fasilitas pelayanan kredit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Bank BPD DIY sudah memiliki dan menerapkan Kebijakan Perkreditan Bank sesuai dengan Kebijakan Perkreditan Bank berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/KEP/DIR Tanggal 31 Maret Tahun 1995. Jenis Penelitian ini adalah studi kasus pada skema perkreditan yang dilakukan oleh Bank BPD DIY. Data diperoleh dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan adalah dengan analisis deskriptif dan analisis komparatif. Analisis deskriptif dilakukan dengan mendeskripsikan Kebijakan Perkreditan yang diterapkan oleh Bank BPD DIY, sedangkan analisis komparatif dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian antara Kebijakan Perkreditan Bank yang ada di bank BPD DIY dengan Kebijakan Perkreditan Bank berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/KEP/DIR Tanggal 31 Maret Tahun 1995.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Perkreditan Bank yang terdapat pada bank BPD DIY telah mengandung semua aspek yang tertuang Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/KEP/DIR Tanggal 31 Maret tahun 1995. Maka, dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Perkreditan Bank yang terdapat pada bank BPD DIY sudah sesuai dengan ketentuan dari Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/KEP/DIR Tanggal 31 Maret tahun 1995.

ABSTRACT

BANK's LOANS POLICY EVALUATION
BASED ON
SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA
NO. 27/162/KEP/DIR TANGGAL 31st MARET 1995
(a Case Study in Bank BPD DIY)

Dwiani Noortriasti
NIM: 052114162
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2010

Bank's loans have risk potential, therefore in its implementation, bank attention to healthy credit extension norms. For that purpose, each bank must have internal loans policy that at least contain all the aspects contained in the Bank's Loans Policy Guidelines set by Bank Indonesia as mentioned in *Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia* No. 27/KEP/DIR 31st March 1995.

Bank BPD DIY is a bank owned by the Provincial Government of Daerah Istimewa Yogyakarta which has loans facilities in their services. This study was aimed to determine whether the Bank BPD DIY already had and implemented policies in accordance with the Bank's Loans Policy Guidelines set by Bank Indonesia as mentioned in *Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia* No. 27/KEP/DIR 31st March 1995 or not. All the data needed were obtained by conducting interviews and documentation. The descriptive and comparative methods were used to analyse the data. Descriptive method was carried out by describing the internal loans policy adopted by the Bank BPD DIY, while the comparative method was carried out by comparing the suitability between the Bank BPD DIY's internal policy and the Bank's Loans Policy Guidelines set by Bank Indonesia as mentioned in *Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia* No. 27/KEP/DIR 31st March 1995.

The results showed that the internal loans policy adopted in Bank BPD DIY already contained all the aspects set out by Bank Indonesia as mentioned in *Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia* No. 27/KEP/DIR 31st March 1995. Thus, it could be concluded that the loans policy of Bank BPD DIY was suitable with the guideline of the *Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia* No. 27/KEP/DIR 31st March 1995.